



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL ADHIM AT**
2. Jabatan : **PANITERA**
3. NHK : **418337**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.657.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 93.500.000
3. Tanah Seluas 1.220 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 183.000.000
4. Tanah Seluas 1.430 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 715.000.000
5. Tanah Seluas 1.600 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 155.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **295.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 222.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000



4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
10.500.000		
5. LAINNYA, THRILL MTB Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
4.500.000		
6. LAINNYA, SEPEDA ROAD BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.		
13.000.000		
7. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.		
23.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	11.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	106.000.000
Sub Total	Rp.	2.109.800.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.109.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.